

ABSTRAK

POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024 (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Oleh

DEVI PUSPITA SARI

Permasalahan pengawasan partisipatif yang kompleks dengan keterbatasan sumber daya dan ruang lingkup yang luas dengan pelanggaran yang terus berkembang menjadi alasan dibutuhkan koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu dan meningkatkan keterlibatan publik sehingga menciptakan konsep jejaring kelembagaan (*networks governance*) karena keterlibatan dari banyak aktor memerlukan strategi khusus agar *output* sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi kebijakan antar lembaga yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan strategi dalam mengatasi masalah komunikasi antar lembaga peningkatan pengawasan partisipatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan teori *networks governance* yaitu inisiasi dan fasilitasi, pengaturan jaringan dan solusi tata kelola jaringan. Data penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor dengan pola komunikasi sirkular diwujudkan dengan pembentukan persepsi, penentuan sumber daya dan hasil norma mengikat melalui MoU per tahun 2023 berjumlah 61 (enam puluh satu) lembaga dan kegiatan yang berlanjut pasca pemilu 2024. Pengaturan jaringan telah memenuhi indikator *network structuring* dan *institutional features* melalui peraturan yang mengikat dengan tugas dan kewajiban tiap lembaga sebagai hasil komunikasi kebijakan. Solusi tata kelola jaringan perlu memperhatikan aspek inovasi dan kebutuhan *stakeholder* untuk memudahkan proses komunikasi dengan aspek *collaborative platform* dan *management strategy* yang berpengaruh pada proses hingga *output* komunikasi kebijakan antar lembaga.

Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, *Networks Governance*, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

INTER-AGENCY POLICY COMMUNICATION PATTERNS IN IMPROVING PARTICIPATORY SUPERVISION IN THE 2024 GENERAL ELECTION

(Study at the Election Supervisory Agency of Lampung Province)

By

DEVI PUSPITA SARI

The problem of complex participatory supervision with limited resources and a wide scope with violations that continue to grow is the reason for the need for good coordination between Bawaslu and a number of agencies to anticipate election violations and increase public involvement so as to create the concept of networks governance due to the involvement of many actors require special strategies so that the output as expected. This research aims to determine the pattern of inter-institutional policy communication developed by Bawaslu of Lampung Province and strategies for overcoming inter-institutional communication problems to increase participatory supervision. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. The analysis was using networks governance theory, namely initiation and facilitation, network settings and network governance solutions. Research data obtained from the results of data collection through interviews, observation and documentation. Based on the results, initiation and facilitation of the interaction process between actors using circular communication patterns is realized by forming perceptions, determining resources and the results of binding norms through MoU as of 2023 totaling 61 (sixty one) institutions and activities that will continue after the 2024 election. Network arrangements have met the indicators of network structuring and institutional features through regulations that bind the duties and obligations of each institution as a result of policy communication. Network governance solutions need to pay attention to innovation aspects and stakeholder needs to facilitate the communication process with aspects of collaborative platforms and management strategies that influence the process and output of policy communication between institutions.

Keywords : Policy Communication, Networks Governance, Participatory Supervision